

Berkinerja Baik, Tanah Laut dapat Insentif Fiskal Rp 14,06 Miliar



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2024/05/word-image-273842-1.jpeg>

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa alokasi tersebut merupakan reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan

Menurut Falih besarnya diberikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kinerja tertentu. “Sesuai dengan UU mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memang telah diamanatkan bahwa Insentif Fiskal yang sebelumnya disebut Dana Insentif Daerah, dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu,” unkap Falih.

Lanjutnya, selain sebagai reward bagi daerah yang berkinerja baik, Insentif Fiskal dari pemerintah pusat juga bertujuan untuk memacu daerah semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Falih menerangkan bahwa dari alokasi sebesar Rp14,06 Miliar tersebut telah tersalurkan sebesar Rp7,03 Miliar di Tahap I di tanggal 13 Mei ini. “Secara ketentuan insentif tersebut disalurkan ke rekening umum daerah sebesar 50 persen untuk tahap I dan 50 persen sisanya di tahap II” tambahnya.

Lebih lanjut lagi Falih menjelaskan, bahwa dana insentif fiskal diharapkan digunakan untuk kegiatan yang mempunyai dampak dan manfaat langsung ke masyarakat, serta diprioritaskan mendukung kebijakan.

“Seperti Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Peningkatan, Investasi, dan Penurunan Kemiskinan. dan tidak digunakan untuk membayar Gaji, Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Perjalanan Dinas,” jelas Falih.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto mengatakan, Kabupaten Tanah Laut pada 2024 memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp14,06 miliar.

“Alokasi tersebut merupakan reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan,” ujar Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Rabu.

Menurut dia, besarnya insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat tersebut berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama dan kinerja tertentu. “Sesuai dengan Undang-Undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, telah diamanatkan insentif fiskal sebelumnya disebut dana insentif daerah (DID) dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu” jelas Falih.

Selain sebagai reward bagi daerah berkinerja baik, sebut dia, insentif fiskal dari pemerintah pusat juga bertujuan untuk memacu daerah semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bahkan, harapnya, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Dia juga menerangkan, dari alokasi sebesar Rp14,06 miliar tersebut telah tersalurkan sebesar Rp7,03 miliar di tahap pertama di 13 Mei 2024. “Secara ketentuan insentif tersebut disalurkan ke rekening umum daerah sebesar 50 persen untuk tahap pertama dan 50 persen sisanya di tahap kedua,” tambahnya.

Kemudian, dia berharap, dana insentif fiskal (DIF) digunakan untuk kegiatan berdampak dan manfaat langsung ke masyarakat. “Terpenting diprioritaskan mendukung kebijakan pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan. dan tidak digunakan untuk membayar gaji, tambahan penghasilan, honorarium dan perjalanan dinas,” demikian tutupnya.

Sumber Berita

1. <https://matabanua.co.id/2024/05/16/berkinerja-baik-tanah-laut-dapat-insentif-fiskal-rp1406-miliar/>, Berkinerja Baik, Tanah Laut dapat Insentif Fiskal Rp14,06 Miliar, (16/05/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414828/kppn-pelaihari-kabupaten-tanah-laut-peroleh-insentif-fiskal-rp1406-miliar>, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari: Kabupaten Tanah Laut peroleh Insentif Fiskal Rp 14,06 miliar, (15/05/2024).

Catatan:

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau

pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).